



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru

Gerih Zulhilmy Arakas^{1*}, Sri Endang Kornita¹, Indri Yovita¹

¹Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru 23293 Indonesia

Corresponding Author: geri.zulhildi4612@student.unri.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Pengaruh PAD, DAU, DAK, Belanja Daerah	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru secara parsial dan simultan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS 26. Data sekunder time series periode 2014-2023 diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, meliputi data PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah. Analisis mencakup uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji simultan, dan uji koefisien determinasi. Ketiga variabel independen (PAD, DAU, dan DAK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru, baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen mampu menjelaskan 82,3% variasi Belanja Daerah, sedangkan 17,7% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian.
Diterima: 23 April 2025	
Disetujui: 01 Mei 2025	

1. LATAR BELAKANG

Implementasi otonomi daerah ditandai dengan desentralisasi fiskal yang menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri secara otonom. Dengan diberlakukannya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah, serta diberi kewenangan untuk mengeksplorasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut secara efektif dan efisien, agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah otonom. Pemerintah Daerah (PEMDA) mempunyai kewenangan atas pendapatan asli daerah (PAD) yaitu untuk belanja daerah dan pembangunan di daerah itu sendiri. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang dikuasakan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat guna meningkatkan daya dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan pajak daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No 32

tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dana perimbangan dan hasil lain yang sah (Fuady, 2023).

Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, maka kewenangan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tingkat kabupaten dipegang oleh Dinas Pendapatan Kabupaten. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara optimal sehingga esensi dan hakikat otonomi daerah dapat diwujudkan. Agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka sumber pendapatan daerah harus dikelola secara optimal untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan (Prasetyo & Amarini, 2024).

Pada tahun 2014 realisasi PAD sebesar 78,65%, tahun 2015 mengalami penurunan realisasi sebesar 48,735, tahun 2016 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 38,76%, pada tahun 2017 realisasi PAD mengalami kenaikan kembali sebesar 68,41%, Pada tahun 2018 realisasi PAD sebesar 57,87%, tahun 2019 PAD mengalami kenaikan sebesar 71,51%, tahun 2020 PAD mengalami penurunan di angka sebesar 62,17%, tahun 2021 PAD mengalami kenaikan sebesar 71,73%, tahun 2022 PAD mengalami kenaikan sebesar 86,01% dan tahun 2023 PAD mengalami penurunan sebesar 85,02%.

Belanja daerah merupakan alokasi yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dan belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan daerah dengan baik dan efektif. Hal ini diharapkan setiap daerah otonom mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah.

Berlakunya UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah membawa perubahan mendasar dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan kota. Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk program pembangunan berbagai fasilitas publik. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas guna meningkatkan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi untuk para investor. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun desentralisasi fiskal memiliki dua sisi penilaian, di satu sisi desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola suatu daerah. Akan tetapi desentralisasi fiskal juga menimbulkan masalah baru, hal ini dipicu oleh tingkat kesiapan fiskal tiap daerah yang berbeda. Terjadi disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah (kabupaten/kota) dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Hal ini dikarenakan, daerah yang kaya akan potensi keuangan memiliki sumber pendanaan daerah (PAD) yang semakin besar sehingga daerah akan semakin maju, tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi kurang. Untuk mengatasi masalah pemerintah pusat memberi bantuan keuangan berupa dana perimbangan (Wibowo & Widodo, 2023).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerahnya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan atau dana transfer dari pemerintah pusat terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut Suryadi & Hukom (2024) bahwa proporsi Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU), terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wahyuni & Subowo (2024) menyatakan bahwa tingginya proporsi dana perimbangan dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan bahwa penerimaan daerah sangat

bergantung pada bantuan keuangan pemerintah pusat. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus semakin kecil.

Idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi PAD dalam hal pembiayaan daerah, maka dapat disimpulkan bahwasannya belanja daerah lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah serta adanya bantuan berupa dana alokasi umum dari pemerintah pusat yang membantu dalam belanja daerah Kota Pekanbaru terlihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 dana PAD lebih kecil dari pada dana DAU dan Belanja Daerah lebih besar. Pada dana PAD mengalami kenaikan dan penurunan, dana DAU tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, adapun belanja daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 pada Kota Pekanbaru.

Adapun tujuan dalam melaksanakan penelitian ini, ialah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

2. METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni – November 2024 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan angka-angka. Penelitian ini bersumber dari data sekunder berdasarkan deret waktu (*time series*) yang didapatkan melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan data yang ada tersebut untuk kebutuhan penelitian. Adapun data yang penulis gunakan yaitu jenis data sekunder berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), data Dana Alokasi Umum (DAU), data Dana Alokasi Khusus (DAK) dan data Belanja Daerah Kota Pekanbaru di tahun 2014 sampai dengan tahun 2023.

Analisa Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang terdiri dari nilai rata-rata (*mean*). Menurut Ghozali (2018) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, *maximum*, *minimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness*. Kumpulan data ekonomi yang berisi sejumlah pengamatan yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data yang dikumpulkan. Beberapa karakteristik yang dijelaskan dalam deskriptif analisis, yaitu *mean*, *maximum*, *minimum*, dan *standard deviation* dengan program SPSS.

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali, (2018) analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas atau variabel terikat, maka disebut regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah data yang diolah dalam penelitian berjumlah 10 sampel, yaitu dari data Kota Pekanbaru yang dijadikan sampel dengan periode penelitian selama 10 tahun, variabel tersebut terdiri dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah; PAD, mempunyai nilai rata-rata sebesar 633475408476,8. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata PAD adalah sebesar Rp. 633475408476,8 yang diperoleh Kota Pekanbaru, artinya rata-rata PAD yang dihasilkan 440557703639 memiliki nilai yang positif. Dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut dikatakan baik. Dalam penelitian juga terdapat nilai maksimum dari *return* saham sebesar Rp. 817.559.402.756 dan terdapat nilai minimum dalam penelitian sebesar Rp. 440.557.703.639; DAU mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp. 811.955.923.229. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan Kota Pekanbaru bersifat positif pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 811.955.923.229.

Tabel 1. Hasil Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	10	440557703639	817559402756	633475408477	131574371977,223
DAU	10	776410356704	874109310441	811955923229	31352685376,866
DAK	10	24935100000	340645036988	204749960037	107610165442,847
Belanja Daerah	10	2025567435019	2613521423631	2340877647015	178333926863,384

Sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 874.109.310.441 dan nilai minimum sebesar Rp. 776.410.356.704. DAK mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp. 204.749.960.037. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan Kota Pekanbaru bersifat positif pada Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 204.749.960.037. Sedangkan nilai maksimum sebesar Rp. 340.645.036.988 dan nilai minimum sebesar Rp. 776.410.356.704. Belanja Daerah mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp. 2.340.877.647.015. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata belanja daerah dalam keadaan baik yaitu sebesar Rp. 2.340.877.647.015. Kemudian nilai maksimum pada penelitian ini mencapai Rp. 2.613.521.423.631 dan nilai minimum sebesar Rp. 24.935.100.000.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Belanja Daerah memiliki sebaran data ialah normal, hal tersebut dilihat dari nilai signifikansi dan nilai $p > 0,05$ dengan nilai Sig sebesar 0,200 dengan ($p > 0,05$). Kesimpulannya hasil uji Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja daerah ialah data terdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0003174
	Std. Deviation	129611387861,56200000
Most Extreme Differences	Absolute	0,201
	Positive	0,121
	Negative	-0,201
Test Statistic		0,201
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja daerah memiliki sebaran data terdapat multikolinearitas pada penelitian. Dengan nilai tolerance pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai *tolerance* 0,117 (> 0.10) dan nilai VIF 5.640 (VIF < 10), pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai *tolerance* 0,904 (> 0.10) dan nilai VIF 1.106 (VIF < 10), dan pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)

dengan nilai *tolerance* 0,176 (> 0.10) dan nilai VIF 5.684 ($VIF < 10$), maka dapat diartikan bahwa terdapat multikolinearitas pada penelitian.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
Constant	2190074086616,870	379762388884,626		5,767	0,001		
PAD	2,119	0,450	1,921	4,704	0,003	0,177	5,640
DAU	-0,986	0,433	-0,412	2,277	0,063	0,904	1,106
DAK	-1,908	0,553	-1,415	-3,452	0,014	0,176	5,684

Uji Autokorelasi

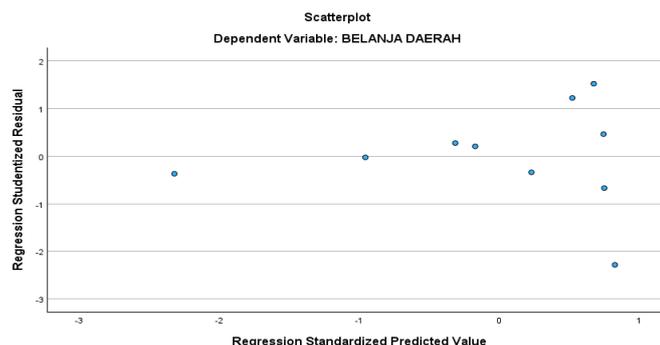
Berdasarkan hasil uji autokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa $DU < DW < 4 - DU$ ialah diketahui $N=10$ dan K (Variabel independen) = 2. Nilai DL ialah 0,525. Nilai DU ialah 1,0163 dan Nilai $4 - DU$ ialah 1,987. Dapat disimpulkan bahwa $DU < DW < 4 - DU$ ialah $1,0163 < 1,891 < 1,987$ dengan hasil tersebut, maka pada penelitian ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,891

Uji Heteroskedastisitas

Kajian Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, data penelitian menyebar dengan baik di atas sumbu Nol ataupun di bawah sumbu Nol (0), maka hasil penelitian dapat dikatakan diterima karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas****Uji t (Parsial)**

Berdasarkan hasil uji t (parsial), maka hipotesis pada penelitian ini diterima karena nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$), yang artinya nilai signifikansi $< 0,05$ maka data pada penelitian ini diterima.

Tabel 5. Uji t (Parsial)

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	155850588569281000000000,000	3	51950196189760400000000,000	9,273	,001 ^b
Residual	33613432332165400000000,000	6	5602238722027560000000,000		
Total	189464020901447000000000,000	9			

Uji F (Silmutan)

Berdasarkan hasil uji F (Simultan), maka hipotesis pada penelitian ini diterima karena nilai pada tabel F lebih besar dari hasil pengujian lebih besar dari tabel f dengan nilai 9,273 ($> 3,708$), yang artinya data pada penelitian ini diterima.

Tabel 6. Uji F (Silmutan)

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	155850588569281000000000,0	3	51950196189760400000000,000	9,273	,001 ^b
Residual	33613432332165400000000,000	6	5602238722027560000000,000		
Total	189464020901447000000000,000	9			

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R²) memiliki nilai sebesar 0,823 (82,3%), maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan variabel independent (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) terhadap variabel *dependent* (Belanja Daerah) adalah sebesar 82,3% sedangkan 17,7% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R²)

Model	Model Summary			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,907 ^a	0,823	0,734	74848104331,557

Model Regeresi Linear Berganda

Tabel 8 diketahui nilai constant (a) sebesar 219007408661 sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (β_1 /koefisien regresi) sebesar 0,520, nilai Dana Alokasi Umum (DAU) (β_2 /koefisien regresi) sebesar 0,364 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (β_3 /koefisien regresi)

Tabel 8. Model Regeresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2190074086616,870	379762388884,626		5,767	0,001
PAD	2,119	0,450	1,921	4,704	0,003
DAK	1,908	0,553	1,415	3,452	0,004
DAU	0,986	0,433	0,412	2,277	0,003

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah Kota Pekanbaru. Peneliti menyarankan agar terdapat penelitian lanjutan terkait faktor-faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah karena hasil uji determinasi menunjukkan bahwa masih terdapat sisa 17,7% pengaruh yang tidak diketahui lewat hasil penelitian ini. Bagi Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat meningkatkan kemandirian pemerintah dan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota Pekanbaru dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, H. (2023). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2006-2021. *Journal of Economic Development*, 1(1): 80–91.
- Ghozali, M. (2017). *Metodologi Penelitian*. Salemba Empat.
- Prasetyo, D. A., & Amarini, I. (2024). Implementasi Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas). *UMPurwokerto Law Review*, 4(1), 138–150.
- Wahyuni, T., & Subowo, E. (2024). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh*. IPDN.
- Wibowo, A.Y.L., & Widodo, S. (2023). Proporsi Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah serta Menunjukkan Ada Tidaknya Flypaper Effect di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2017-2019. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2): 114–127.